Pediamu : Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran
E-ISSN : 2808-764X
Vol. 1, No. 4 Oktober - Desember 2026
https://publishermu.com/index.php/pediamu/
DOI :

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH REGULER: KAJIAN PUSTAKA NARATIF

Syamsuddin[1], Nurul Mutahara[2], Kiki Fardila Ayu Lestari[3]
[1, 2, 3] Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
[1] syamsuddin6270@unm.ac.id, [2] nurulmutahara@unm.ac.id, [3] kikifardilaayulestari@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Published : 28 Nov 2026

Keywords

anak berkebutuhan khusus, kajian pustaka, pendidikan inklusif, strategi implementasi, tantangan.

children with special needs, literature review, inclusive education, implementation strategy, challenges.

ABSTRACT

Pendidikan inklusif membuka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama teman sebaya di sekolah reguler, tetapi pelaksanaannya di Indonesia belum merata. Artikel ini bertujuan menguraikan tantangan implementasi pendidikan inklusif dan strategi untuk mengatasinya. Kajian dilakukan melalui telaah pustaka naratif terhadap kajian lingkup pendidikan inklusi di Indonesia, penelitian internasional dan nasional tentang guru, kurikulum, dan sarana, serta regulasi akomodasi yang layak. Hasil kajian menunjukkan enam tantangan, yaitu kompetensi dan sikap guru, pembagian peran guru kelas dan guru pembimbing khusus, kurikulum yang belum adaptif, sarana dan aksesibilitas, manajemen dan sumber daya sekolah, serta stigma dan lemahnya kerja sama. Strategi yang dapat ditempuh meliputi pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, pembelajaran yang disesuaikan berbasis asesmen, penguatan manajemen sekolah, penyediaan akomodasi yang layak, pelibatan keluarga, dan dukungan pemerintah. Kebaruan kajian terletak pada pemetaan pasangan tantangan dan strategi yang diselaraskan dengan regulasi akomodasi yang layak terbaru.

Inclusive education gives children with special needs the opportunity to learn with peers in regular schools, yet its implementation in Indonesia remains uneven. This article describes the challenges of implementing inclusive education and strategies to address them. A narrative literature review was conducted on a scoping review of inclusive education in Indonesia, international and national studies on teachers, curriculum, and facilities, and regulations on reasonable accommodation. Six challenges were identified: teacher competence and attitudes, role division between classroom and special education teachers, non-adaptive curricula, facilities and accessibility, school management and resources, and stigma and weak collaboration. Strategies include continuous teacher professional development, assessment-based adapted instruction, stronger school management, reasonable accommodation, family involvement, and government support. The novelty lies in mapping challenge-strategy pairs aligned with the latest reasonable accommodation regulation.

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan inklusif menjadi salah satu cara memperluas hak tersebut melalui sekolah reguler. Pernyataan Salamanca memandang sekolah reguler yang berorientasi inklusif sebagai sarana efektif untuk melawan sikap diskriminatif dan mewujudkan pendidikan untuk semua.[1] Gagasan ini berpijak pada prinsip menerima setiap peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, maupun latar belakang lainnya.[2]

Menerima ABK di kelas reguler belum cukup untuk disebut inklusif. Ainscow menegaskan bahwa inklusi menyangkut kehadiran, partisipasi, dan capaian belajar semua peserta didik.[3] Sekolah perlu menyesuaikan kurikulum, sarana prasarana, cara mengajar, dan penilaian dengan kebutuhan peserta didik, sementara guru dituntut menggunakan pendekatan yang beragam dan bekerja secara kolaboratif.[4] Model sosial disabilitas juga menempatkan hambatan pada lingkungan dan sistem yang belum menyesuaikan diri, bukan semata pada kondisi individu.[5]

Di Indonesia, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 lama menjadi landasan pendidikan inklusif.[6] Ketentuannya mengenai peserta didik berkelainan kemudian dicabut oleh Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang mengatur akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.[7] Pengaturan ini menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.[8] Meskipun

[1] UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Paris: UNESCO, 1994).

[2] Tony Booth dan Mel Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools* (Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002).

[3] Mel Ainscow, "Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences," *Nordic Journal of Studies in Educational Policy* 6, no. 1 (2020): 7–16, https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587.

[4] A. Andriyan, W. Hendriani, dan P. P. Paramita, "Pendidikan Inklusi: Tantangan dan Strategi Implementasinya," *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 94–106, https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25076.

[5] Mike Oliver, "The Social Model of Disability: Thirty Years On," *Disability & Society* 28, no. 7 (2013): 1024–26, https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773.

[6] Kementerian Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa* (Jakarta, 2009).

[7] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi* (Jakarta, 2023).

[8] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas* (Jakarta, 2020); Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta, 2016).

kebijakan terus berkembang, pelaksanaan di lapangan belum merata. Data tahun 2018 yang dikutip Andriyan dan rekan menunjukkan bahwa hanya sekitar 18 persen dari 1,6 juta ABK yang memperoleh layanan pendidikan inklusif.[9]

Kajian tentang pendidikan inklusif di Indonesia umumnya membahas satu aspek secara terpisah, misalnya sikap guru, sarana prasarana, atau kebijakan. Andriyan dan rekan telah memetakan tantangan dan strategi implementasi melalui kajian lingkup.[10] Artikel ini melanjutkan pemetaan tersebut dengan memadukannya dengan penelitian internasional tentang guru dan pedagogi inklusif, penelitian nasional tentang pelaksanaan inklusi di sekolah dasar, serta regulasi akomodasi yang layak yang berlaku sejak 2023. Kebaruan kajian ini terletak pada pemetaan pasangan tantangan dan strategi yang diselaraskan dengan regulasi tersebut.

Artikel ini membahas dua pertanyaan, yaitu (1) apa tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler dan (2) strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Artikel ini berargumen bahwa tantangan implementasi inklusi saling berkaitan sehingga strategi yang berdiri sendiri cenderung kurang efektif.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan telaah pustaka naratif yang bersifat deskriptif. Telaah naratif dipilih karena tujuan kajian adalah menyintesis gagasan dari berbagai jenis sumber, bukan mengukur besaran efek. Sumber utama adalah kajian lingkup Andriyan dan rekan yang menelaah 14 literatur terpilih dari 197 literatur yang teridentifikasi.[11] Sumber tersebut dilengkapi tiga kelompok sumber lain.

1. **Penelitian internasional** tentang sikap dan kesiapan guru, pedagogi inklusif, kolaborasi, dan pengembangan profesional guru.
2. **Penelitian nasional** tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar Indonesia, termasuk sarana prasarana dan permasalahan sekolah.
3. **Regulasi dan dokumen kebijakan**, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

Sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan tantangan atau strategi implementasi pendidikan inklusif, serta statusnya sebagai artikel jurnal, buku akademik,

[9] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[10] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[11] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."

laporan lembaga internasional, atau regulasi resmi. Analisis dilakukan dengan membaca sumber, menandai gagasan yang berulang, mengelompokkannya ke dalam tema tantangan dan strategi, lalu mengaitkan keduanya.[12] Penelitian yang hanya diperoleh melalui sumber utama dikutip secara tidak langsung dengan menyebutkan sumber utamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu budaya, kebijakan, dan praktik.[13] Budaya membangun komunitas dan nilai yang menghargai perbedaan. Kebijakan menerjemahkan nilai itu menjadi aturan dan dukungan, sedangkan praktik mewujudkannya di dalam dan di luar kelas. Pencegahan perundungan, misalnya, memerlukan nilai saling menghargai, aturan yang jelas, dan pembiasaan hubungan yang harmonis. Ketiga dimensi ini menjadi kerangka untuk membaca tantangan dan strategi berikut.

Tantangan Implementasi

Telaah pustaka menghasilkan enam tantangan implementasi pendidikan inklusif berikut.

1. **Kompetensi dan sikap guru.** Banyak guru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar ABK. Pelatihan yang tersedia terkadang bersifat formalitas tanpa evaluasi dampak, sebagaimana dirangkum Andriyan dan rekan.[14] Tinjauan internasional menunjukkan bahwa sikap guru terhadap inklusi berkaitan dengan ketersediaan dukungan[15] dan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar reguler bersikap netral atau ragu terhadap inklusi.[16] Akibatnya, ABK berisiko tetap terpisah secara sosial dan akademik meskipun berada di kelas reguler.
2. **Pembagian peran guru kelas dan guru pembimbing khusus.** Sebagian guru kelas menganggap ABK sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru pembimbing khusus, padahal tanggung jawab pembelajaran tetap berada pada guru kelas.[17] Giangreco

[12] Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101, https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.
[13] Booth dan Ainscow, *Index for Inclusion*.
[14] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[15] Elias Avramidis dan Brahm Norwich, "Teachers' Attitudes towards Integration/Inclusion: A Review of the Literature," *European Journal of Special Needs Education* 17, no. 2 (2002): 129–47, https://doi.org/10.1080/08856250210129056.
[16] Anke de Boer, Sip Jan Pijl, dan Alexander Minnaert, "Regular Primary Schoolteachers' Attitudes towards Inclusive Education: A Review of the Literature," *International Journal of Inclusive Education* 15, no. 3 (2011): 331–53, https://doi.org/10.1080/13603110903030089.
[17] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."

mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pendamping dapat mengurangi interaksi ABK dengan guru kelas dan teman sebaya.[18]

3. **Kurikulum yang belum adaptif.** Kurikulum umum yang dikaji belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan ABK.[19] Materi, metode, dan penilaian yang seragam menyulitkan peserta didik dengan kecepatan dan cara belajar berbeda.
4. **Sarana dan aksesibilitas.** Toilet yang tidak aksesibel serta ketiadaan bidang landai atau lift menyulitkan peserta didik dengan disabilitas fisik, terutama pengguna kursi roda. Penelitian di sekolah dasar Indonesia juga menempatkan kelengkapan sarana sebagai unsur penting penyelenggaraan inklusi.[20]
5. **Manajemen dan sumber daya sekolah.** Keterbatasan tenaga pendukung, pelatihan, dan pengelolaan sekolah dilaporkan sebagai hambatan pelaksanaan inklusi di Indonesia.[21] Kriswanto dan rekan juga mengidentifikasi kompetensi guru, kebutuhan pendampingan, dan dukungan sarana sebagai faktor yang memengaruhi layanan inklusif di sekolah dasar.[22]
6. **Stigma dan lemahnya kerja sama.** Pandangan negatif terhadap disabilitas menambah beban ABK, yaitu hambatan karena disabilitas sekaligus karena stigma. Tarnoto menemukan bahwa kurangnya dukungan dan kesadaran berbagai pihak, termasuk orang tua, menjadi permasalahan sekolah dasar penyelenggara inklusi.[23]

Keenam tantangan tersebut menunjukkan bahwa hambatan inklusi tidak hanya bersumber dari kekurangan fisik. Sebagian besar tantangan berkaitan dengan kapasitas

[18] Michael F. Giangreco, "One-to-One Paraprofessionals for Students with Disabilities in Inclusive Classrooms: Is Conventional Wisdom Wrong?," *Intellectual and Developmental Disabilities* 48, no. 1 (2010): 1–13, https://doi.org/10.1352/1934-9556-48.1.1.

[19] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."

[20] Y. Suvita dkk., "Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus* 6, no. 2 (2022): 155–64, https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601; R. Amaliani dkk., "Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi: Kunci Sukses Pendidikan Inklusi," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 10, no. 1 (2024): 361–66, https://doi.org/10.37905/aksara.10.1.361-366.2024.

[21] Sunardi dkk., "The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia," *Excellence in Higher Education* 2, no. 1 (2011): 1–10, https://doi.org/10.5195/ehe.2011.27; Mohammad Efendi, "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality," *Journal of ICSAR* 2, no. 2 (2018): 142–47, https://doi.org/10.17977/um005v2i22018p142.

[22] D. Kriswanto, Suyatno, dan Sukirman, "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan," *Jurnal Basicedu* 7, no. 5 (2023): 3081–90, https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6167.

[23] N. Tarnoto, "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD," *Humanitas: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 1 (2016): 50–61, https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843.

manusia, pembagian peran, dan budaya sekolah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengembangan inklusi menyangkut perubahan budaya, kebijakan, dan praktik sekaligus.[24]

Strategi Implementasi

Strategi implementasi perlu berpegang pada lima prinsip, yaitu kesetaraan, relevansi, akses, efektivitas, dan efisiensi.[25] Pilihan strategi juga harus disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan tiap sekolah. Telaah pustaka menghasilkan enam strategi berikut.

1. **Mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.** Sekolah dapat memperkuat pelatihan dalam jabatan dan pengembangan profesional berbasis sekolah. Darling-Hammond dan rekan menyimpulkan bahwa pengembangan profesional yang efektif bersifat berkelanjutan, kolaboratif, dan disertai pendampingan.[26] Pelatihan juga terbukti dapat memengaruhi sikap, pengetahuan, dan strategi mengajar guru sekolah dasar di Indonesia.[27] Pelatihan *co-teaching* membantu dua guru berbagi informasi dan beban mengajar.[28]
2. **Menyesuaikan pembelajaran berbasis asesmen.** Guru perlu mengontekstualkan proses belajar serta menyusun program pembelajaran individual (PPI) sesuai hasil asesmen. Pembelajaran berdiferensiasi[29] dan kerangka *Universal Design for Learning*[30] menyediakan dasar untuk menyesuaikan isi, proses, dan ekspresi belajar. Pedagogi inklusif menekankan perluasan pilihan belajar bagi semua peserta didik, bukan penyediaan yang terpisah bagi sebagian peserta didik.[31]
3. **Memperkuat manajemen sekolah.** Kepala sekolah perlu menggerakkan guru pendamping dan melibatkan orang tua agar pengelolaan lebih efektif, sebagaimana

[24] Mel Ainscow, Tony Booth, dan Alan Dyson, *Improving Schools, Developing Inclusion* (London: Routledge, 2006).
[25] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[26] Linda Darling-Hammond, Maria E. Hyler, dan Madelyn Gardner, *Effective Teacher Professional Development* (Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2017).
[27] Farida Kurniawati dkk., "Evaluating the Effect of a Teacher Training Programme on the Primary Teachers' Attitudes, Knowledge and Teaching Strategies Regarding Special Educational Needs," *Educational Psychology* 37, no. 3 (2017): 287–97, https://doi.org/10.1080/01443410.2016.1176125.
[28] Marilyn Friend dan Lynne Cook, *Interactions: Collaboration Skills for School Professionals*, ed. ke-9 (Pearson, 2021).
[29] Carol Ann Tomlinson, *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*, ed. ke-2 (Alexandria, VA: ASCD, 2014).
[30] CAST, *Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2* (Wakefield, MA: CAST, 2018), https://udlguidelines.cast.org.
[31] Lani Florian dan Kristine Black-Hawkins, "Exploring Inclusive Pedagogy," *British Educational Research Journal* 37, no. 5 (2011): 813–28, https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096.

dirangkum Andriyan dan rekan.[32] Ainscow menekankan pentingnya kolaborasi di dalam dan antarsekolah dalam mewujudkan inklusi dan kesetaraan.[33]

4. **Menyediakan akomodasi yang layak.** Prioritas dapat diberikan pada bidang landai, toilet aksesibel, jalur pemandu, dan alat bantu belajar. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur penyediaan akomodasi yang layak berdasarkan asesmen dan peran Unit Layanan Disabilitas.[34] Prinsip desain universal mengarahkan sekolah merancang lingkungan yang dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang.[35]
5. **Membangun kesadaran dan dukungan keluarga.** Program penyadaran dapat mengurangi prasangka di kalangan warga sekolah dan masyarakat. Orang tua perlu dilibatkan sejak asesmen hingga evaluasi program anak.[36]
6. **Memperkuat dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas pihak.** Pemerintah berperan menyediakan anggaran, pelatihan, layanan, dan fasilitas ramah disabilitas.[37] Sekolah dapat bekerja sama dengan pusat sumber dan perguruan tinggi. Rasmitadila dan rekan menunjukkan bahwa guru sekolah dasar inklusif memandang perguruan tinggi berperan dalam program pendampingan sekolah.[38]

Keterkaitan Tantangan dan Strategi

Kajian ini memperlihatkan bahwa satu strategi tidak cukup berdiri sendiri. Pelatihan guru, misalnya, kurang berdampak bila kurikulum kaku dan sarana tidak tersedia. Penyediaan sarana juga kurang bermakna bila guru belum terampil menyesuaikan pembelajaran. Pemetaan pasangan tantangan dan strategi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Tantangan dan Strategi Implementasi Pendidikan Inklusif

Tantangan	Strategi Utama	Dukungan Regulasi atau Kerangka
Kompetensi dan sikap guru	Pengembangan profesional berkelanjutan dan pendampingan	Kajian pengembangan profesional guru

[32] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[33] Ainscow, "Promoting Inclusion and Equity."
[34] *Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023*.
[35] Edward Steinfeld dan Jordana Maisel, *Universal Design: Creating Inclusive Environments* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012).
[36] B. Nugroho dan M. C. W. Trihastuti, "Peran Orang Tua dan Guru dalam Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak dengan Hambatan Intelektual," *Jurnal Psiko Edukasi* 22, no. 1 (2024): 40–49, https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v22i1.5521.
[37] UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All* (Paris: UNESCO, 2020).
[38] Rasmitadila, Megan Asri Humaira, dan Reza Rachmadtullah, "Teachers' Perceptions of the Role of Universities in Mentoring Programs for Inclusive Elementary Schools: A Case Study in Indonesia," *Journal of Education and e-Learning Research* 8, no. 3 (2021): 333–39, https://doi.org/10.20448/journal.509.2021.83.333.339.

Tantangan	Strategi Utama	Dukungan Regulasi atau Kerangka
Pembagian peran guru	*Co-teaching* dan perencanaan PPI bersama	Kerangka kolaborasi profesional
Kurikulum belum adaptif	Pembelajaran berdiferensiasi berbasis asesmen	*Universal Design for Learning*
Sarana dan aksesibilitas	Akomodasi yang layak berbasis asesmen	PP Nomor 13 Tahun 2020, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023
Manajemen dan sumber daya	Kepemimpinan kepala sekolah dan kolaborasi antarsekolah	Kerangka indeks inklusi
Stigma dan kerja sama	Program penyadaran dan pelibatan keluarga	UU Nomor 8 Tahun 2016

Sumber: Sintesis peneliti dari sumber yang ditelaah, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa strategi yang efektif bergerak pada tiga dimensi sekolah inklusif secara bersamaan. Pengembangan guru dan penyesuaian pembelajaran berada pada dimensi praktik. Akomodasi yang layak dan penguatan manajemen berada pada dimensi kebijakan. Penyadaran dan pelibatan keluarga berada pada dimensi budaya. Karena itu, sekolah sebaiknya mulai dengan memetakan kebutuhan, menetapkan prioritas, membagi peran, lalu mengevaluasi hasilnya secara berkala.

Pembahasan

Dari Penerimaan Menuju Partisipasi

Temuan kajian ini menegaskan bahwa tantangan utama inklusi di Indonesia terletak pada peralihan dari sekadar menerima ABK menuju partisipasi dan capaian belajar yang setara. Data yang menunjukkan rendahnya cakupan layanan inklusif[39] memperlihatkan bahwa akses pun belum merata. Namun, akses yang tersedia belum otomatis menjamin partisipasi apabila kompetensi guru, kurikulum, dan budaya sekolah belum mendukung.[40]

Peran Regulasi Akomodasi yang Layak

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menggeser pengaturan dari kategori peserta didik berkelainan menuju akomodasi yang layak berbasis asesmen kebutuhan.[41] Pergeseran ini sejalan dengan model sosial disabilitas yang menekankan penyesuaian lingkungan.[42] Konsekuensinya, sekolah perlu memiliki kemampuan asesmen dan perencanaan dukungan, sehingga strategi pengembangan guru dan penguatan manajemen menjadi prasyarat bagi pelaksanaan regulasi tersebut.

[39] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, "Pendidikan Inklusi."
[40] Ainscow, "Promoting Inclusion and Equity."
[41] *Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023*.
[42] Oliver, "Social Model of Disability."

Kekhasan Konteks Sekolah

Strategi implementasi tidak dapat diseragamkan. Sekolah dengan keterbatasan anggaran dapat memulai dari strategi berbiaya rendah, seperti pembagian peran, perencanaan bersama, dan pelibatan keluarga, sambil mengusulkan pemenuhan sarana secara bertahap. Prinsip efisiensi dan relevansi yang dirangkum Andriyan dan rekan[43] relevan untuk menentukan urutan prioritas tersebut.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini merupakan telaah naratif dan bukan kajian sistematis, sehingga pemilihan sumber tidak mengikuti protokol pencarian yang terdokumentasi. Sebagian penelitian dikutip secara tidak langsung melalui sumber utama. Kajian ini juga tidak didukung data lapangan, sehingga pemetaan tantangan dan strategi perlu diuji melalui penelitian empiris di sekolah.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler masih menghadapi enam tantangan, yaitu kompetensi dan sikap guru, pembagian peran guru kelas dan guru pembimbing khusus, kurikulum yang belum adaptif, sarana yang belum aksesibel, manajemen dan sumber daya yang lemah, serta stigma dan kerja sama yang kurang. Penanganannya memerlukan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, pembelajaran yang disesuaikan berbasis asesmen, penguatan manajemen sekolah, akomodasi yang layak, pelibatan keluarga, serta dukungan pemerintah secara terpadu.

Kebaruan kajian ini terletak pada pemetaan pasangan tantangan dan strategi yang diselaraskan dengan regulasi akomodasi yang layak terbaru. Sekolah disarankan melakukan asesmen kebutuhan dan menyusun rencana prioritas, sedangkan pemerintah perlu menjamin dukungan yang berkelanjutan. Penelitian berikutnya perlu menggunakan kajian sistematis dan studi lapangan untuk menguji pemetaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ainscow, Mel, Tony Booth, dan Alan Dyson. *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge, 2006.

Ainscow, Mel. “Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences.” *Nordic Journal of Studies in Educational Policy* 6, no. 1 (2020): 7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587.

[43] Andriyan, Hendriani, dan Paramita, “Pendidikan Inklusi.”

Amaliani, R., S. E. Yunitasari, D. Fajriah, S. Salmiani, dan E. Gustini. "Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi: Kunci Sukses Pendidikan Inklusi." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 10, no. 1 (2024): 361–66. https://doi.org/10.37905/aksara.10.1.361-366.2024.

Andriyan, A., W. Hendriani, dan P. P. Paramita. "Pendidikan Inklusi: Tantangan dan Strategi Implementasinya." *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 94–106. https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25076.

Avramidis, Elias, dan Brahm Norwich. "Teachers' Attitudes towards Integration/Inclusion: A Review of the Literature." *European Journal of Special Needs Education* 17, no. 2 (2002): 129–47. https://doi.org/10.1080/08856250210129056.

de Boer, Anke, Sip Jan Pijl, dan Alexander Minnaert. "Regular Primary Schoolteachers' Attitudes towards Inclusive Education: A Review of the Literature." *International Journal of Inclusive Education* 15, no. 3 (2011): 331–53. https://doi.org/10.1080/13603110903030089.

Booth, Tony, dan Mel Ainscow. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.

CAST. *Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2*. Wakefield, MA: CAST, 2018. https://udlguidelines.cast.org.

Darling-Hammond, Linda, Maria E. Hyler, dan Madelyn Gardner. *Effective Teacher Professional Development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2017.

Efendi, Mohammad. "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality." *Journal of ICSAR* 2, no. 2 (2018): 142–47. https://doi.org/10.17977/um005v2i22018p142.

Florian, Lani, dan Kristine Black-Hawkins. "Exploring Inclusive Pedagogy." *British Educational Research Journal* 37, no. 5 (2011): 813–28. https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096.

Friend, Marilyn, dan Lynne Cook. *Interactions: Collaboration Skills for School Professionals*. Ed. ke-9. Pearson, 2021.

Giangreco, Michael F.. "One-to-One Paraprofessionals for Students with Disabilities in Inclusive Classrooms: Is Conventional Wisdom Wrong?." *Intellectual and Developmental Disabilities* 48, no. 1 (2010): 1–13. https://doi.org/10.1352/1934-9556-48.1.1.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta, 2009.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang*

Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285711.

Kriswanto, D., Suyatno, dan Sukirman. "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan." *Jurnal Basicedu* 7, no. 5 (2023): 3081–90. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6167.

Kurniawati, Farida, Anke A. de Boer, Alexander E. M. G. Minnaert, dan Frieda Mangunsong. "Evaluating the Effect of a Teacher Training Programme on the Primary Teachers' Attitudes, Knowledge and Teaching Strategies Regarding Special Educational Needs." *Educational Psychology* 37, no. 3 (2017): 287–97. https://doi.org/10.1080/01443410.2016.1176125.

Nugroho, B., dan M. C. W. Trihastuti. "Peran Orang Tua dan Guru dalam Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak dengan Hambatan Intelektual." *Jurnal Psiko Edukasi* 22, no. 1 (2024): 40–49. https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v22i1.5521.

Oliver, Mike. "The Social Model of Disability: Thirty Years On." *Disability & Society* 28, no. 7 (2013): 1024–26. https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, 2016.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Jakarta, 2020.

Rasmitadila, Megan Asri Humaira, dan Reza Rachmadtullah. "Teachers' Perceptions of the Role of Universities in Mentoring Programs for Inclusive Elementary Schools: A Case Study in Indonesia." *Journal of Education and e-Learning Research* 8, no. 3 (2021): 333–39. https://doi.org/10.20448/journal.509.2021.83.333.339.

Steinfeld, Edward, dan Jordana Maisel. *Universal Design: Creating Inclusive Environments*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.

Sunardi, Mucawir Yusuf, Gunarhadi, Priyono, dan John L. Yeager. "The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia." *Excellence in Higher Education* 2, no. 1 (2011): 1–10. https://doi.org/10.5195/ehe.2011.27.

Suvita, Y., T. I. B. Manullang, Sunardi, dan M. Supriatna. "Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif." *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus* 6, no. 2 (2022): 155–64. https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601.

Tarnoto, N.. "Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD." *Humanitas: Indonesian Psychological Journal* 13, no. 1 (2016): 50–61. https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843.

Tomlinson, Carol Ann. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Ed. ke-2. Alexandria, VA: ASCD, 2014.

UNESCO. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO, 1994.

UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All*. Paris: UNESCO, 2020.